

CORPORATE GOVERNANCE AND RELATED PARTY TRANSACTIONS

Hanna

Business School, University Pelita Harapan
hanna.wijaya@uph.edu

Abstract

This research aims to empirically test the influence of corporate governance mechanisms on Related Party Transactions. The Mechanism of Corporate Governance is measured by some variables as of Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, Audit Committees. Related Party Transaction variables are determined based on Disclosure and RPT Amount as measured by RPTAL. The data used in this study is secondary data. The samples used in this study were selected using purposive sampling with the aim of obtaining samples that fit the criteria. The sample in this study amounted to 299 observations listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2018. The results of this study show that Management Ownership, Independent Commissioners and Audit Committees have significant influence on RPT Disclosure and Institutional Ownership has no significant effect on RPT Disclosure. Meanwhile, the influence of the CG mechanism proxied by Independent Commissioner is the only one variable that has a significant influence on the "Besaran RPT" variable, while the variables of Institutional Ownership, Management Ownership, and Audit Committee have no effect on the "Besaran RPT" variable.

Keywords: *Institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committee*

TATA KELOLA DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hanna

Business School, University Pelita Harapan
hanna.wijaya@uph.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme corporate governance terhadap Related Party Transaction. Mekanisme Corporate Governance terbagi menjadi variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit. Variabel Related Party Transaction ditentukan berdasarkan Disclosure dan Besaran RPT yang diukur dengan RPTAL. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria. Sampel pada penelitian ini berjumlah 299 observasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajemen, Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan RPT dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan RPT. Sedangkan, pengaruh mekanisme CG terhadap Besaran RPT hanya Komisaris Independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Besaran RPT, sedangkan variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Besaran RPT.

Kata Kunci: *RPT, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit*

PENDAHULUAN

Praktik RPT umum dilakukan di wilayah Asia, termasuk Indonesia, dimana karakteristik struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan umumnya terkonsentrasi di tangan pemegang saham tertentu. Oleh sebab itu, timbul permasalahan keagenan seperti perampasan kekayaan pemegang saham non-pengendali dengan pemegang saham pengendali (Claessens et al, 2002). Menurut Gordon et al (2004), Ryngaert dan Thomas (2007), RPT dapat memiliki dampak positif atau negatif pada kinerja perusahaan. Kemudian RPT dapat dikelompokkan menjadi transaksi yang bersifat merugikan (*abusive* RPT berdasarkan *the conflict of interest hypothesis*) dan menguntungkan (*efficient* RPT berdasarkan *the efficient transaction hypothesis*) sesuai dengan penelitian Chang dan Hong (2000), Gordon et al (2004), Cheung et al (2009), dan Kohlbeck dan Mayhew (2010).

Efficient RPT dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar suatu perusahaan dengan menurunkan biaya transaksi, dan adanya jaminan untuk terjadinya RPT relatif tinggi dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien. Di sisi lain, *abusive* RPT digunakan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham pengendali dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham non-pengendali. Penelitian Johnson et al. (2000) menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat mengambil alih kekayaan pemegang saham non-pengendali dengan berbagai cara diantaranya pemegang saham pengendali dapat memperoleh uang tunai tambahan dengan menjual aset, barang, atau jasa kepada perusahaan melalui RPT dengan harga di atas harga pasar; dapat memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang disetujui; serta dapat mentransfer aset antar perusahaan di bawah kendali mereka, aktivitas seperti ini disebut tunneling.

Total dari transaksi RPT *efficient* dan *abusive* menjadi pengukur besaran RPT pada laporan keuangan dan jumlah besaran RPT dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan RPT (Utama dan Utama, 2014). Terkait dengan penyajian besaran dan pengungkapan RPT pada laporan keuangan sudah di atur melalui Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 dan PSAK 7, sehingga dengan demikian laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan atas entitas pelapor yang bermanfaat dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Untuk itu, didalam memutuskan informasi apa saja yang harus dilaporkan, perusahaan menganut *Full Disclosure Principle* yang artinya memberikan informasi yang cukup penting untuk memengaruhi penilaian dan keputusan pengguna, termasuk keberadaan RPT.

Salah satu cara untuk menanggulangi dan meminimalisir praktik abusive RPT adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam *Corporate Governance* (CG) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). GCG merupakan suatu mekanisme di dalam perusahaan guna meminimalisir masalah keagenan sehingga praktik GCG diharapkan dapat mengurangi *asymmetric information*, meningkatkan keterbukaan dan transparansi laporan keuangan. Penerapan CG yang lebih baik menghasilkan pemantauan RPT yang lebih intensif, serta memastikan bahwa RPT dilakukan karena alasan efisiensi seraya meminimalkan abusive RPT.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* (CG) yaitu jumlah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit dengan pengungkapan dan besaran RPT. Penelitian mengenai RPT masih jarang dilakukan di Indonesia, sehingga menarik perhatian peneliti untuk diteliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian Utama dan Utama (2012) dan Utama (2015). Sebagai kontribusi, penelitian ini mengukur variabel RPT dari sisi besaran RPT dan tingkat pengungkapan RPT sehingga hasil

penelitian ini diharapkan bisa memberikan paparan yang lebih menyeluruh atas RPT.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan

Menurut Schroeder et al (2013), teori keagenan didefinisikan sebagai hubungan konsensual antara dua pihak, di mana satu pihak (agent) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain (principal). Ada hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer karena pemilik atau pemegang saham tidak memiliki keahlian dalam mengelola perusahaannya sendiri atau memiliki pekerjaan yang lain sehingga membutuhkan seorang agent untuk mewakili pemegang saham. Manajer yang direkrut oleh pemegang saham diharapkan dapat dipercaya dalam mengambil keputusan demi kepentingan pemegang saham. Namun, pemegang saham tidak dapat mengamati setiap aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil oleh manajer sehingga ada ancaman bahwa manajer akan bertindak untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri daripada para pemegang saham.

Teori keagenan muncul ketika ada konflik antara pihak shareholders dengan manajemen dimana pihak manajemen sebagai agent lebih memiliki banyak informasi terkait internal perusahaan dibandingkan dengan shareholders sebagai principal yang memungkinkan terjadinya kecurangan yang tidak diketahui oleh *shareholders* (Schroeder et al, 2013), ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent akan menyebabkan munculnya asimetris informasi.

Corporate Governance

Corporate Governance didefinisikan sebagai satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. *Corporate Governance* melibatkan sekumpulan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan shareholder serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan (stakeholder). *Corporate governance* juga menyediakan struktur melalui perangkat untuk mencapai tujuan perusahaan dan memantau kinerja yang telah ditetapkan perusahaan (OECD, 2004)

Menurut Utama (2015), menyatakan bahwa praktik Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalisasi masalah keagenan dan praktik GCG diharapkan dapat mengurangi asymmetric information. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), menyatakan bahwa perusahaan harus menerapkan GCG dalam setiap aspek bisnis dan Praktik GCG yang harus diterapkan, yaitu: Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan shareholder dan stakeholder lainnya.

Menurut Rezaee (2009), ada dua mekanisme *corporate governance* yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal dirancang untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan perusahaan agar dapat menciptakan sustainable *stakeholder value*. Beberapa contoh dari mekanisme internal mencakup board of director terutama direksi independen, komite audit, manajemen, pengendalian internal dan fungsi audit internal. Sedangkan mekanisme eksternal bertujuan untuk mengawasi kinerja dan aktivitas perusahaan agar memastikan kepentingan pihak internal perusahaan selaras dengan pihak eksternal perusahaan. Beberapa contoh dari mekanisme eksternal yaitu pasar modal dan pasar tenaga kerja

Related Party Transaction (RPT)

Menurut PSAK 7 Rev 2015 (2018), Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pihak-pihak berelasi dengan entitas pelapor yaitu Orang, anggota keluarga dekatnya. Jika orang yang bersangkutan memiliki pengendalian/pengendalian bersama; memiliki pengaruh signifikan; atau personil kunci di entitas pelapor atau di induk. Entitas lain dalam satu grup usaha; berhubungan sebagai asosiasi atau ventura bersama; imbalan pasca kerja; dikendalikan oleh orang yang sama; entitas lain yang dipengaruhi signifikan oleh seseorang, atau entitas lain yang mempekerjakan seorang personel kunci, dan orang tersebut memiliki kendali/kendali bersama atas entitas pelapor. Tidak Termasuk Pihak Berelasi adalah: Dua entitas karena memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari suatu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain; Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama; Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan pemerintah yang tidak memiliki kendali/kendali bersama atau pengaruh signifikan; Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum yang tergantung secara ekonomis karena keadaan.

Di Indonesia, Regulasi untuk mengurangi ekspropriasi dan dampak negatif RPT, pasar modal badan pengawas di Indonesia, Bapepam-LK, mengeluarkan beberapa peraturan untuk melindungi kepentingan minoritas dan pemegang saham lainnya. Selain itu, undang-undang perusahaan yang baru diberlakukan (Undang-Undang No. 40 Perusahaan Terbatas pada tahun 2007) juga membahas persetujuan tentang proses transaksi benturan kepentingan.

Tingkat Besaran Related Party Transaction

Besaran RPT terdiri dari efficient RPT dan abusive RPT, Efficient RPT dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar suatu perusahaan dengan menurunkan biaya transaksi, dan adanya jaminan untuk terjadinya RPT relatif tinggi dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien. Menurut OECD (2009), *abusive* RPT adalah kondisi di mana pihak yang mengendalikan perusahaan melakukan transaksi yang merugikan pemegang saham non pengendali. *Efficient* RPT menguntungkan pemegang saham mayoritas maupun minoritas, akan tetapi *abusive* RPT melalui tunneling transaction pemegang saham mayoritas merampas kas pemegang saham minoritas.

Tunneling related party transaction dapat berupa kegiatan memperoleh uang tunai tambahan dengan menjual aset, barang, atau jasa kepada perusahaan melalui RPT dengan harga diatas pasar, dapat memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang disetujui, serta dapat mentransfer aset antar perusahaan dibawah kendali mereka. Untuk membatasi tindakan ekspropriasi tersebut maka diperlukan adanya standar akuntansi dan mekanisme corporate governance (Tata kelola) yang memadai. Penerapan CG menjadi sangat penting pada perusahaan yang berada di negara dengan kondisi penegakan hukum yang sangat lemah, dimana tidak terdapat perangkat hukum yang cukup untuk melindungi pemegang saham non pengendali (Klapper dan Love, 2004; dalam Utama 2015). Kohlbeck dan Mayhew (2004) dan Hwang et al. (2010) menunjukkan penerapan CG yang lebih baik menghasilkan pemantauan RPT yang lebih intensif, serta memastikan bahwa RPT dilakukan karena alasan efisiensi seraya meminimalkan abusive RPT.

Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Pengungkapan transaksi pihak berelasi yaitu diungkapkan adanya pihak berelasi baik ketika ada transaksi ataupun tidak ada. Ketika terdapat transaksi, maka diungkapkan dengan terpisah dengan kategori entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh

signifikan, entitas anak, ventura bersama, personil kunci, pihak-pihak berelasi lainnya. Item yang diungkapkan untuk transaksi tersebut: Jumlah transaksi, Jumlah saldo termasuk komitmen, Penyisihan piutang ragu-ragu, Beban atas piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang. Mulai tahun 2000, perusahaan publik diwajibkan oleh Bapepam-LK (Peraturan Bapepam VIII.G.7) untuk mengungkapkan informasi tentang RPT dalam laporan keuangan yang diaudit.

Mulai tahun 2008, perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan pihak terkait adalah diharuskan untuk mengungkapkan kepada publik mengenai peristiwa tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi (Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan conflict of interest). Selain itu, transaksi (termasuk RPT) yang melibatkan conflict of interest harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen sebelum dapat dilakukan. Informasi yang wajib untuk diungkapkan cukup rumit, di antaranya adalah obyek transaksi yang bersangkutan, nilai transaksi yang bersangkutan, nama pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan; dan sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan;

Selain itu, perusahaan harus menunjuk pihak eksternal yang independen untuk mengevaluasi keadilan transaksi. Pembeneran transaksi harus disediakan dengan membandingkannya dengan pihak independen eksternal. Harus ada pernyataan dari komisaris dan direksi bahwa semua informasi material diungkapkan dan tidak menyesatkan. Transaksi Afiliasi berikut ini hanya wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan di atas, dikembangkan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap besaran RPT.**
- H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap besaran RPT.**
- H₃: Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap besaran RPT.**
- H₄: Komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap besaran transaksi pihak berelasi.**
- H₅: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi**
- H₆: Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi**
- H₇: Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi.**
- H₈: Komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi.**

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipilih adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian berfokus dilakukan hanya untuk periode tahun 2015-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap; Perusahaan dengan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah dan pelaporannya

berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya; Perusahaan yang melaporkan saldo transaksi pihak berelasi yang terkait dengan aset dan liabilitas dalam laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 – 2018; Perusahaan yang tidak melakukan delisting selama tahun 2015 – 2018;

Perusahaan yang tidak mempunyai saldo ekuitas negative; Informasi terkait mekanisme tata kelola perusahaan disajikan pada laporan tahunan (annual report) maupun laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan pada tahun 2015 - 2018.

Model Empiris Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua model penelitian. Model 1 untuk melihat dampak CG terhadap besaran RPT, sementara model 2 untuk melihat dampak CG terhadap pengungkapan RPT. Lebih lanjut, kedua model yang digunakan penelitian dinyatakan sebagai berikut:

Model 1

$$B_RPT = \alpha + \beta_1 Kep_Instit + \beta_2 Kep_Manit + \beta_3 Kom_Indit + \beta_4 Kom_Auit + \beta_5 KAPit + \beta_6 Sizeit + \beta_7 MACit + \beta_8 DARit + \varepsilon$$

Model 2

$$DIS_RPTit = \alpha + \beta_1 Kep_Instit + \beta_2 Kep_Manit + \beta_3 Kom_Indit + \beta_4 Kom_Auit + \beta_5 KAPit + \beta_6 Sizeit + \beta_7 MACit + \beta_8 DARit + \varepsilon$$

Keterangan:

α	= Konstanta
β	= Koefisien variabel
B_RPT	= Besaran RPT
DIS_RPT	= Pengungkapan RPT
Kep_Inst	= Kepemilikan Institusional
Kep_Man	= Kepemilikan Manajerial
Kom_Ind	= Komisaris Independen
Kom_AU	= Komite Audit
SIZE	= Ukuran Perusahaan
KAP	= Katagori Kantor Akuntan Publik
it	= Di perusahaan i pada tahun t
MAC	= <i>Market Capitalization</i>
DAR	= <i>Debt to Asset Ratio</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, terdapat 333 sampel yang memenuhi kriteria secara penuh dan peneliti mengeluarkan 34 sampel yang merupakan data *outlier*.

Analisis Pearson's Correlation Coefficient

Tabel 1
Pearson's Correlation Coefficient

	B_RPT	DIS_RPT	Kep_Inst	Kep_Man	Kom_Ind
B_RPT	1	.077	-.088	.045	.066
DIS_RPT	.077	1	.004	.073	-.037
Kep_Inst	-.088	.004	1	-.453**	.063
Kep_Man	.045	.073	-.453**	1	.080
Kom_Ind	.066	-.037	.063	.080	1
Kom_Au	-.044	-.024	.313**	-.145*	.066
KAP	-.157**	.287**	.334**	-.074	.081
SIZE	-.068	.310**	.395**	-.292**	.078
MAC	-.149**	.254**	.474**	-.167**	.071
DAR	.484**	.164**	-.111	-.081	-.047

Berdasarkan tabel diatas nilai korelasi masing-masing variabel independen dibawah 0.80 kecuali SIZE terhadap MAC 0.836 dimana kedua variabel terdeteksi mengalami masalah multikolinieritas dan dibutuhkan test lanjutan. Kemudian, tanda negatif pada nilai korelasi menunjukan arah hubungan antar variabel dan digunakan pula untuk memprediksi hasil pengujian hipotesis.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi untuk kedua model penelitian:

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.517 ^a	.267	.247	.089260

a. Predictors: (Constant), DAR, Kom_Ind, Kom_Au, Kep_Man, KAP, MAC, Kep_Inst, SIZE

b. Dependent Variable: B_RPT

Pada Model Penelitian 1 didapat hasil R^2 0.247, dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel dependen (B_RPT) hanya 24.7% dijelaskan oleh variasi pada variabel independen (Kep_Man, Kep_Inst, Kom_Au, Kom_Ind) yang terdapat pada model ini sisanya sebesar 75.3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.176	.10826556255 5773

a. Predictors: (Constant), DAR, Kom_Ind, Kom_Au, Kep_Man, KAP, MAC, Kep_Inst, SIZE

b. Dependent Variable: DIS_RPT

Nilai daripada Adjusted R² diperoleh sebesar 0.176, hasil tersebut menjelaskan variasi pada variabel dependen (Dis_RPT) hanya 17.6% dijelaskan oleh variasi pada variabel independen (Kep_Man, Kep_Inst, Kom_Au, Kom_Ind) yang terdapat pada model ini dan sisanya sebesar 82.4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji F

Hasil uji kelayakan model penelitian untuk kedua model adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji F Model 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.844	8	.105	13.234	.000 ^b
	Residual	2.311	290	.008		
	Total	3.154	298			

a. Dependent Variable: B_RPT

b. Predictors: (Constant), DAR, Kom_Ind, Kom_Au, Kep_Man, KAP, MAC, Kep_Inst, SIZE

Pada Tabel 4 di atas didapat hasil yaitu sebesar 0.000, dimana < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (B_RPT).

Pengujian yang sama dilakukan untuk Model Penelitian 2 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji F Model 2
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.841	8	.105	8.966	.000 ^b
	Residual	3.399	290	.012		
	Total	4.240	298			

a. Dependent Variable: DIS_RPT

b. Predictors: (Constant), DAR, Kom_Ind, Kom_Au, Kep_Man, KAP, MAC, Kep_Inst, SIZE

Nilai F Sig 0.000 yang dimana sama dengan Model Penelitian 1 yaitu < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen (DIS_RPT) dan model sudah layak untuk melakukan penelitian ini.

Uji t

Pengujian t dimaksudkan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen terhadap variasi dependen pada model penelitian 1 dan 2. Penentuan sigifikansi pengaruh atas variabel independen ditentukan dari nilai probabilitas t yang mana harus berada pada *confidence interval* 99%,95% dan 90% atau $\alpha = 0.01, 0.05, \text{ dan } 0.1$. Tabel tabulasi berikut memuat hasil uji t untuk masing-masing model penelitian:

Tabel 6
Hasil Uji t Model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.107	.135		.797	.426
	Kep_Inst	.026	.114	.015	.232	.817
	Kep_Man	.032	.042	.046	.756	.450
	Kom_Ind	.117	.062	.097	1.901	.058
	Kom_Au	-.001	.022	-.003	-.052	.959
	KAP	-.014	.013	-.067	-1.115	.266
	SIZE	-.015	.007	-.228	-2.065	.040
	MAC	.020	.012	.178	1.575	.116
	DAR	.269	.029	.538	9.209	.000

a. Dependent Variable: B_RPT

Di dalam penelitian bisnis besaran α atau tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.1, 0.05, dan 0.01, angka tersebut digunakan sebagai acuan dalam menerima atau menolak Null Hypothesis. Hasil penelitian untuk menguji hipotesis H1 sampai H4 digambarkan melalui Tabel 6 diatas. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Besaran RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien (β beta) yang bernilai 0.026 dan probabilitas (p-value) pada variabel Kepemilikan Institusional dengan *two tailed* sebesar 0.817, sedangkan penelitian ini menggunakan *one tailed* sehingga didapat p-value sebesar 0.4085 dan melebihi $\alpha = 0.10$. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1) ditolak karena terdapat bukti bahwa tidak adanya pengaruh signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Besaran RPT pada tingkat $\alpha = 0.1$.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap Besaran RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien (β beta) yang bernilai 0.032 dan nilai probabilitas *two tailed* sebesar 0.451, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.2255 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value $> \alpha = 0.10$. Dengan demikian maka hipotesis kedua (H2) ditolak karena terdapat bukti bahwa tidak adanya pengaruh signifikan Kepemilikan manajerial terhadap Besaran RPT pada tingkat $\alpha = 0.1$.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Besaran RPT. Untuk menguji hipotesis

tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien (β beta) yang bernilai 0.117 dan p-value pada variabel Komisaris Independen dengan *two tailed* 0,058, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.029, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas tidak melebihi nilai $\alpha = 0.05$. Hipotesis ketiga (H3) ditolak karena terdapat perbedaan arah hubungan antara Komisaris Independen dan besaran RPT meskipun signifikan.

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Besaran RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien (β beta) yang bernilai -0.001 dan p-value pada variabel Komite audit dengan *two tailed* 0.959 pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.4795, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas melebihi nilai $\alpha = 0.10$. Dengan demikian maka hipotesis keempat (H4) ditolak karena terdapat bukti bahwa tidak adanya pengaruh signifikan Komite Audit terhadap Besaran RPT.

Tabel 7
Hasil Uji t Model 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.050	.163		.309	.758
	Kep_Inst	-.171	.138	-.086	-1.239	.216
	Kep_Man	.109	.051	.137	2.160	.032
	Kom_Ind	-.096	.075	-.069	-1.290	.198
	Kom_Au	-.037	.026	-.081	-1.420	.157
	KAP	.052	.015	.218	3.454	.001
	SIZE	.016	.009	.205	1.774	.077
	MAC	.013	.015	.104	.876	.382
	DAR	.112	.035	.194	3.176	.002

a. Dependent Variable: DIS_RPT

Hasil penelitian untuk menguji hipotesis H5 sampai H8 digambarkan melalui Tabel 7 diatas Hipotesis Kelima (H5) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien yang bernilai -0.171 dan nilai probabilitas pada variabel Kepemilikan Institusional dengan *two tailed* sebesar 0.216, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.108 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas melebihi nilai $\alpha = 0.10$. Dengan demikian maka hipotesis kelima (H5) ditolak karena terdapat bukti bahwa tidak adanya pengaruh signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan RPT pada $\alpha = 0.10$. Hipotesis Keenam (H6) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien yang bernilai 0.109 dan p-value pada variabel Kepemilikan Manajerial dengan *two tailed* sebesar sebesar 0.032, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.016 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas tidak melebihi nilai $\alpha = 0.05$. Dengan demikian maka hipotesis keenam (H6) diterima karena terdapat bukti bahwa adanya pengaruh positif signifikan Kepemilikan Manajemen terhadap Pengungkapan RPT pada $\alpha = 0.05$.

Hipotesis Ketujuh (H7) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien yang bernilai

-0.096 dan p-value pada variabel Komisaris Independen dengan *two tailed* sebesar 0.198, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.099 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas dibawah nilai $\alpha=0.10$. Dengan demikian maka hipotesis ketujuh (H7) ditolak karena terdapat bukti bahwa pengaruh negatif signifikan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan RPT pada $\alpha = 0.10$.

Hipotesis Kedelapan (H8) menyatakan bahwa mekanisme CG yang diprosikan dengan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan RPT. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memperoleh hasil bahwa koefisien yang bernilai -0.037 dan p-value pada variabel Komite Audit dengan *two tailed* sebesar 0.157, pengukuran hasil penelitian dengan *one tailed* sebesar 0.0785 dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas tidak melebihi nilai $\alpha = 0.10$. Dengan demikian maka hipotesis ke delapan (H8) ditolak karena terdapat bukti bahwa adanya pengaruh negatif signifikan Komite Audit terhadap Pengungkapan RPT.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Besaran RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis pertama variabel Kepemilikan Institusional diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar 0.4085. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan dimana p-value lebih besar dari pada tingkat signifikansi 0.1. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak, dan hasil ini menunjukkan kenaikan Kepemilikan Institusional tidak mempunyai pengaruh pada Besaran RPT. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan hasil penelitian Utama (2015) yang menemukan bahwa CG tidak berpengaruh terhadap Besaran RPT. Dugaan utama atas temuan ini, bahwa tidak berpengaruhnya Kepemilikan Institusional terhadap Besaran RPT pada penelitian ini disebabkan oleh masih sedikitnya perusahaan manufaktur di Indonesia yang dimiliki oleh lembaga atau institusi yang tercermin pada rata-rata perusahaan pada yang hanya sebesar 4.64%. Sehingga pihak institusional tidak memiliki pengaruh yang kuat di dalam perusahaan dalam mempengaruhi terjadinya transaksi yang dilakukan perusahaan, termasuk dalam hal RPT.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Besaran RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis kedua variabel Kepemilikan Manajerial diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar 0.2255. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan dimana p-value lebih besar dari pada tingkat signifikansi 0.10. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak, implikasinya adalah kenaikan Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan pada Besaran RPT. Hasil serupa juga ditemukan dan memperkuat penelitian Utama (2015) yang menemukan bahwa CG tidak berpengaruh terhadap Besaran RPT.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Besaran RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis ketiga variabel Komisaris Independen diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar 0.029. Komisaris Independen berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0.05$. Namun, arah pengaruh yang diberikan tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun. Dari hasil uji t pada tabel 6 terlihat bahwa nilai β untuk Komisaris Independen adalah positif yang memiliki arti bahwa semakin besar Komisaris Independen maka besaran RPT nya akan menjadi semakin besar dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Besaran RPT ditolak. Diduga hasil tersebut terjadi karena kehadiran komisaris independen hanya

sekedar memenuhi aturan bursa yakni minimal 30% dari seluruh jajaran komisaris perusahaan, tetapi efektifitas dari kinerja pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan besaran RPT menjadi semakin besar.

Pengaruh Komite Audit terhadap Besaran RPT

Komite Audit tidak berpengaruh signifikan dimana p-value lebih besar dari pada tingkat signifikansi 0.1. Hasil didapat dari pengujian secara parsial terhadap hipotesis keempat variabel Komite Audit adalah 0,4795 (*one tailed*). Dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan Komite Audit tidak akan mempunyai pengaruh pada Besaran RPT. Hasil penelitian ini konsisten dengan dengan hasil penelitian Utama (2015) yang menemukan bahwa CG tidak berpengaruh terhadap Besaran RPT. Diduga kuat jumlah Komite Audit pada perusahaan dalam peneltian ini hanya sebatas pemenuhan peraturan dan persyaratan pasar modal saja yaitu 3 anggota komite audit. Sedangkan fungsi pengawasan dari Komite Audit belum dapat dibuktikan secara efektif mempengaruhi transaksi pihak berelasi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan RPT

Hasil olah data uji t menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional suatu perusahaan bukan merupakan penentu tingginya tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dilakukan perusahaan. Pengujian secara parsial terhadap hipotesis kelima variabel Kepemilikan Institusional diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar 0.108. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan dimana p-value lebih besar dari pada tingkat signifikansi 0.1. Dengan demikian hipotesis kelima ditolak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis keenam variabel Kepemilikan Manajerial diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar 0.016. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0.05$ dan nilai koefisien pada hasil data sesuai dengan hipotesis yang ada. Nilai β untuk Kepemilikan manajerial adalah positif yang memiliki arti bahwa semakin besar Kepemilikan Manajerial maka pengungkapan RPT akan semakin besar. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan RPT diterima, hal ini memperkuat dugaan peneliti semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka tingkat monitoring semakin kuat sehingga manajer akan meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil ini selaras dengan penelitian Kurniawan dan Izzaty (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis ketujuh variabel Komisaris Independen diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar -0.099. Komisaris Independen berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0.1$. Namun, hasil arah koefisien yang diberikan tidak sesuai dengan hipotesis yang ada dan menyebabkan hipotesis ketujuh ditolak. Diduga walaupun BAPEPAM – LK telah mengatur jumlah minimal komisaris independen dalam dewan komisaris tetapi efektifitas kinerja tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, ditambah dengan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme penunjukan komisaris independen. Hal ini juga terlihat dalam perusahaan pada penelitian ini, terdapat beberapa komisaris independen yang juga merangkap jabatan sebagai presiden komisaris. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Lo (2011) yang menyatakan komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan RPT

Pengujian secara parsial terhadap hipotesis kedelapan variabel Komite Audit diperoleh nilai signifikansi dengan *one tail* sebesar -0,0785. Komite audit berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0.10$. Namun, hasil koefisien yang diberikan tidak sesuai dengan hipotesis yang ada. Dari persamaan regresi terlihat bahwa nilai β untuk Komite audit adalah negatif. Dengan demikian hipotesis kedelapan ditolak. Diduga adanya komite audit hanya sebatas pemenuhan peraturan pasar modal saja yaitu berjumlah 3 anggota komite audit. Sedangkan fungsi pengawasan dari komite audit belum dapat dibuktikan secara efektif mempengaruhi pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hasil ini bertolak belakang dengan Kurniawan dan Izzaty (2018) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pihak-pihak berelasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan 299 observasi atas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Perusahaan Manufaktur Terbuka di Indonesia memiliki struktur kepemilikannya masih terkonsentrasi pada pemegang saham tertentu. (2) Besaran RPT pada penelitian ini dipandang sebagai RPT yang abusive dikarenakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. (3) Fungsi Mekansime *Corporate Governance* pada perusahaan sampel masih belum efektif untuk menyikapi besaran dan pengungkapan RPT. (4) Kehadiran komite audit dan komisaris independen diduga hanya untuk pemenuhan syarat formil bursa dan belum berjalan efektif sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A., Elder, R., Beasley, M., & Hogan, C. (2017). *Auditing and assurance services* (16th ed.). Boston: Pearson.
- BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN. (2012). *Keputusan Ketua Bapepam dan LK No : Kep-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan sLaporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta.
- Bennouri, M., Nekhili, M., & Touron, P. (2015). Does Auditors' Reputation Discourage Related Party Transactions? *The French Case*. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.1823464
- Brigham, E., & Houston, J. (2019). *Fundamentals of financial management (15th Edition)*. Boston: Cengage.
- Chang, S. and J. Hong. (2000). Economic Performance of Group-affiliated Companies in Korea: Intergroup Resource Sharing and Internal Business Transactions. *Academy of Managerial Journal*, 43 (3), 429-448.
- Cheung, Y. L., et al. (2009). Tunneling and Propping Up: An Analysis of Related Party Transactions by Chinese Listed Companies. *Pacific-Basin Finance Journal*, 17 (3), 372-393.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J., & Lang, L. (2002). Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings. *The Journal Of Finance*, 57(6), 2741-2771.

- Cornett, M., Marcus, A., Saunders, A., & Tehranian, H. (2006). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. *Journal Of Banking & Finance*, 31(6), 1771-1794.
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gordon, E., Henry, E., & Palia, D. (2004). *Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value*. Diunduh tanggal 16 Juli 2011, <http://www.nd.edu/~carecob/Workshops/0405%20Workshops/Gordon.pdf>.
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. (2016). Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 1 No. 1.
- Hapsoro, D., & Fadhilla, A. (2017). Relationship Analysis of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure and Economic Consequences: Empirical Study of Indonesia Capital Market. *The South East Asian Journal Of Management*, 11(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta: IAI.
- Izzaty, K., & Kurniawan, P. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Kepemilikan dan Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Pasca Konvergensi IFRS. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* Vol. 8 No. 2. Diambil 22 September 2019, dari <https://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/572>.
- Johnson, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer. (2000). Tunnelling. *American Economic Review Papers and Proceedings*, 90 (2), 22-27.
- Kholbeck, M. and B. W. Mayhew. (2010). Valuation of Firms that Disclose Related Party Transactions. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29 (2), 115-137.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2009). *Corporate Governance Series: Guide on Fighting Abusive Related Party Transactions in Asia*. OECD Asia
- PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA*. (2006). Jakarta:KNKG, pp.3-6.
- Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015. Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Priyanto, Duwi. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Statistik data dengan SPSS*. Cetakan pertama. Jakarta: Mediakom
- Putri, Firmanda Imantyas dan Mohammad Nasir, (2006), Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen Dalam Perspektif Teori Keagenan, *Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus 2006*.

- Rezaee, Zabihollah. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. USA: John Wiley
- Ryngaert, M, and S.E., Thomas, “*Related Party Transactions: Their Origins and Wealth Effects.*” *Working Paper*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=970689>, 2007.
- Schroeder, R., Clark, M. and Cathey, J. (2013). *Financial Accounting Theory and Analysis* (11th Edition). USA: Wiley.
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory Third Edition*. Toronto:Pearson Prentice Hall.
- Sudaryono. (2014). *Teori dan Aplikasi dalam Statistik*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Andi.
- Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Pasal 99 ayat 1 dan 2 tentang Perseroan Terbatas. Diakses tanggal 04 Oktober 2019.
- Utama, C. A. (2015). Penentu besaran transaksi pihak berelasi: Tata kelola, tingkat pengungkapan, dan struktur kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 37–54.
- Utama, S., & Utama, C. A. (2012). Determinants of Disclosure Level of Related Party Transactions in Indonesia. *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol 2, 1-25.
- Utama, S., & Utama, C. A. (2013). Corporate Governance, Size and Disclosure of Related Party Transactions, and Firm Value: Indonesia evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol 11, No.4.p.341-365.